



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

- a. memperoleh informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen Kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan Sasaran Strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki Kinerja dan peningkatan akuntabilitas Kinerja.

Pasal 3 ...

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan rencana kerja tahunan;
- b. menyusun dokumentasi penetapan Kinerja;
- c. menyusun laporan akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan evaluasi pencapaian Kinerja;
- e. menyusun perencanaan jangka menengah; dan
- f. memantau dan mengendalikan Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat:
 - a. Sasaran Strategis;
 - b. indikator Kinerja;
 - c. satuan indikator Kinerja;
 - d. formulasi penghitungan capaian Kinerja;
 - e. sumber data; dan
 - f. penanggung jawab IKU.
- (2) Ketentuan mengenai uraian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI SUMEDANG

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 7 September 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 38

SALINAN SESUAI ASLINYA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

YAN MAHAL RIZZAL, S.H, M.H.

NIP. 197701042006041002

Kepala Bagian Hukum



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Agamis dan Berkarakter						
1.	Mewujudkan masyarakat yang sehat cerdas dan berkarakter	1. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	$\sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$ Dimana: • Indeks Kesehatan: Menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Komponen utamanya adalah Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. • Indeks Pendidikan: Menggambarkan dimensi pengetahuan. Indeks ini dibentuk dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). • Indeks Pengeluaran: Menggambarkan dimensi standar hidup layak melalui pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2.	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	Persen	$\frac{\text{Jumlah balita stunting}}{\text{Jumlah balita yang diukur}} \times 100$ Dimana: • Balita stunting (pendek dan sangat pendek) adalah anak umur 0–59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks PB/U atau TB/U yang memiliki Z-score kurang dari -2 SD menurut standar WHO.	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis (<i>Treatment Coverage</i>)	Persen	$\frac{\text{Jumlah kasus TB ditemukan dan diobati}}{\text{Estimasi jumlah kasus TB}} \times 100$ Dimana: Persentase semua kasus TBC yang ditemukan dan diobati serta dilaporkan dibandingkan dengan perkiraan jumlah semua kasus TBC (insiden) dalam satu tahun.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4. Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Treatment Success Rate</i>)	Persen	$\frac{\text{Jumlah pasien TB sembuh + pengobatan lengkap}}{\text{Jumlah pasien TB yang mulai pengobatan}} \times 100$ Dimana: - Kasus TBC sembuh: Pasien TBC paru terkonfirmasi bakteriologis yang pada awal pengobatan positif dan hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif serta pada salah satu pemeriksaan sebelumnya juga negatif. - Pengobatan lengkap: Pasien TBC yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap, dengan salah satu pemeriksaan sebelum akhir pengobatan menunjukkan hasil negatif, tetapi tanpa bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan. - Kasus TBC yang diobati: Seluruh pasien TBC yang mendapatkan pengobatan OAT dan masuk dalam kohort pengobatan yang dinilai.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Mewujudkan kehidupan sosial yang dijiwai keimanan dan ketakwaan sesuai keyakinan masyarakat, yang taat hukum, berbudaya dan demokratis	5. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	$\frac{S_{\text{toleransi}} + S_{\text{kesetaraan}} + S_{\text{kerja sama}}}{3}$ Dimana: - Toleransi: sikap menerima, menghormati dan memberi ruang terhadap perbedaan agama/keyakinan. - Kesetaraan: pandangan bahwa warga dari agama yang berbeda memiliki hak dan kewajiban yang sama serta tidak didiskriminasi. - Kerja Sama: kesediaan bekerja bersama dan membangun kehidupan sosial secara inklusif lintas agama.	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Skor tiap dimensi berasal dari instrumen survei instansi pembina, dapat memakai rata-rata tertimbang bila bobot resmi ditetapkan.		
		6. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah objek budaya warisan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah total objek budaya warisan terdata}} \times 100$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
MISI 2 : Memperkuat Birokrasi Profesional dan Responsif						
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif berbasis teknologi digital	7. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	RB General (Strategi RB General + Capaian Pelaksanaan Kebijakan + Capaian Sasaran Strategis) + RB Tematik (Strategi Pelaksanaan RB Tematik + Capaian Indikator Dampak)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
5.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa	8. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	Persen	Indeks Integritas hasil Survei Penilaian Integritas KPK pada skala 0–100.	Komisi Pemberantasan Korupsi	Inspektorat
		9. Indeks Desa	Indeks	DLD + DS + DE + DL + DA + DTPD Dimana: - DLD: Indeks Dimensi Layanan Dasar. - DS: Indeks Dimensi Sosial. - DE: Indeks Dimensi Ekonomi. - DL: Indeks Dimensi Lingkungan. - DA: Indeks Dimensi Aksesibilitas. - DTPD: Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.	Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital.	10. Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	Indeks	Σ (Nilai Tingkat Kematangan Indikator $\times$ Bobot Indikator) Dimana: - Nilai Tingkat Kematangan Indikator: tingkat kematangan setiap indikator Pemerintahan Digital, dengan skala 1 sampai 5. - Bobot Indikator: bobot masing-masing indikator dalam instrumen Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital. seluruh bobot indikator berjumlah 100%. Σ: penjumlahan seluruh nilai indikator setelah dikalikan bobotnya. - Indeks Pemdi dibentuk dari 20 indikator yang dikelompokkan ke dalam 7 aspek pada evaluasi. - Bobot 7 Aspek, yaitu:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				✓ Tata Kelola dan Manajemen 10%. ✓ Penyelenggara 10%. ✓ Data 15%. ✓ Keamanan Pemerintah Digital 15%. ✓ Teknologi Pemerintah Digital 10%. ✓ Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah 15%. ✓ Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah 25%.		
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah	11. Nilai Skor LPPD Kabupaten	Skor	$[(CKM + CKUP) \times 0,75] + (PKM \times 0,25)$ Dimana: • CKM: Capaian Kinerja Makro, yaitu capaian indikator kinerja makro daerah. • CKUP: Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan, yaitu capaian kinerja urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan berdasarkan indikator kinerja kunci beserta bobotnya. • PKM: Perubahan Kinerja Makro, yaitu perubahan capaian kinerja makro dibandingkan periode sebelumnya. • 0,75: Bobot gabungan Capaian Kinerja Makro dan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan. • 0,25: bobot Perubahan Kinerja Makro.	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah
MISI 3 : Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Merata dan Berkeadilan						
8.	Mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah	12. Indeks Kualitas Infrastruktur	Indeks	$\Sigma (\text{Bobot Indeks Komponen} \times \text{Nilai Indeks Komponen})$ Dimana: • Nilai Indeks Komponen: nilai masing-masing kelompok infrastruktur yang menjadi cakupan indikator daerah. • Bobot Indeks Komponen: bobot yang ditetapkan pemerintah daerah sesuai struktur indikator dan kebijakan kinerja daerah. • Jumlah seluruh bobot 100%.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas	13. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	$\frac{\text{Jumlah RT dengan dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan}}{\text{Jumlah seluruh RT}} \times 100$ Dimana:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan: rumah tangga yang memenuhi kriteria hunian layak, keterjangkauan, dan keberlanjutan sesuai definisi/metodologi indikator yang berlaku. - Jumlah Seluruh Rumah Tangga: seluruh rumah tangga dalam wilayah pengukuran pada periode yang sama.		
		14. Indeks Konektivitas Jalan	Indeks	$\frac{\sum \text{Ruas atau Segmen Jaringan Jalan}}{\sum \text{Simpul atau Titik Jaringan Jalan}}$ Dimana: - Jumlah ruas/segmen jaringan jalan, yaitu jalan yang menghubungkan simpul-simpul dalam wilayah yang dianalisis. - Jumlah simpul/titik jaringan jalan, yaitu persimpangan atau pusat/wilayah yang menjadi titik hubungan jaringan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
MISI 4 : Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan						
10.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi Yang inklusif dan berkelanjutan	15. Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	$\frac{\text{PDRB}_{\text{ADHK},t} - \text{PDRB}_{\text{ADHK},t-1}}{\text{PDRB}_{\text{ADHK},t-1}} \times 100$ Dimana: - PDRB ADHK_t: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada tahun berjalan (tahun t). - PDRB ADHK_{t-1}: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan pada tahun sebelumnya (tahun t-1). - LPE menunjukkan persentase perubahan produksi barang dan jasa riil suatu wilayah dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan. Penggunaan PDRB atas dasar harga konstan menghilangkan pengaruh perubahan harga. - LPE positif menunjukkan terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa; LPE negatif menunjukkan kontraksi ekonomi.	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB									
		16. Indeks Resiko Bencana	Indeks	$R= H * \frac{V}{C}$ dimana: • R: Disaster Risk: Risiko Bencana • H: Hazard Threat: Frekuensi (kemungkinan) bencana tertentu cenderung terjadi dengan intensitas tertentu pada lokasi tertentu • V: Vulnerability: Kerugian yang diharapkan (dampak) di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana tertentu terjadi dengan intensitas tertentu. Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana • C: Adaptive Capacity: Kapasitas yang tersedia di daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu. Semakin tinggi kapasitas, semakin rendah risiko. <table><tr><th>Komponen</th><th>Bobot</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>Bahaya (<i>Hazard</i>)</td><td>40%</td><td>Menggambarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan fenomena alam seperti gempa bumi, banjir dan ancaman lainnya. Komponen ini relatif sulit diturunkan karena tren dampak bahaya cenderung meningkat.</td></tr><tr><td>Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)</td><td>30%</td><td>Menggambarkan tingkat kerentanan wilayah terhadap dampak bencana. Dalam metodologi tersebut diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI.</td></tr></table>	Komponen	Bobot	Keterangan	Bahaya (<i>Hazard</i>)	40%	Menggambarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan fenomena alam seperti gempa bumi, banjir dan ancaman lainnya. Komponen ini relatif sulit diturunkan karena tren dampak bahaya cenderung meningkat.	Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)	30%	Menggambarkan tingkat kerentanan wilayah terhadap dampak bencana. Dalam metodologi tersebut diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Komponen	Bobot	Keterangan													
Bahaya (<i>Hazard</i>)	40%	Menggambarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan fenomena alam seperti gempa bumi, banjir dan ancaman lainnya. Komponen ini relatif sulit diturunkan karena tren dampak bahaya cenderung meningkat.													
Kerentanan (<i>Vulnerability</i>)	30%	Menggambarkan tingkat kerentanan wilayah terhadap dampak bencana. Dalam metodologi tersebut diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI.													

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI			SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
					Kapasitas (Capacity) 30% Menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana. Komponen ini dapat ditingkatkan melalui investasi dan kebijakan peningkatan kapasitas daerah. Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berdasarkan 71 indikator Total 100%			
11.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis inovasi dan teknologi.	17. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penganggur}}{\text{Jumlah Angka Kerja}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Penganggur: penduduk yang termasuk kategori pengangguran menurut konsep ketenagakerjaan BPS. - Jumlah Angkatan Kerja: jumlah penduduk bekerja ditambah jumlah pengangguran.			Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
12.	Terkendalnya stabilitas fiskal daerah.	18. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	$\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{PDRB}_{ADHB}} \times 100$ Dimana: - Realisasi Pajak Daerah: realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan sesuai laporan realisasi pendapatan pemerintah daerah. - PDRB_{ADHB}: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku pada tahun yang sama, sebagai ukuran nilai aktivitas ekonomi wilayah.			Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
13.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	$w_1 \times \text{IKA} + w_2 \times \text{IKU} + w_3 \times \text{IKTL}$ Dimana: IKA: Indeks Kualitas Air.			Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				• IKU: Indeks Kualitas Udara. • IKTL/IKL: Indeks Kualitas Tutupan Lahan/ Lahan. • w1, w2, w3: bobot sesuai pedoman instansi pembina.		
MISI 5 : Memperkuat Kesejahteraan dan Ketahanan Sosial						
14.	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	20. Tingkat Kemiskinan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$ Dimana: • Jumlah Penduduk Miskin: penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. • Jumlah Penduduk: seluruh penduduk pada wilayah dan periode pengukuran yang sama. • Garis Kemiskinan (GK): nilai minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan. GK terdiri atas Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM).	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
15.	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	21. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	$\frac{(\text{IKesejahteraan} + \text{IKetahanan} + \text{IPartisipasi})}{3}$ Dimana: • Iketentruman: ibadah, Legalitas Keluarga, Jamninan Kesehatan dan Keharmonisan • Ikemandirian: Pemenuhan Kebutuhan Dasar,Kelangsungan Pendidikan, Kesehatan Keluarga Akses Informasi dan Jaminan Keluarga. • IKebahagiaaan: Interaksi Kelurga dan Interaksi Sosial. • Dengan ketentuan setiap dimensi terlebih dahulu dihitung menjadi nilai indeks pada skala 0–100, kemudian ketiga nilai indeks tersebut dirata-ratakan. Karena ketiga dimensi memiliki bobot yang sama, masing-masing dimensi memiliki bobot 1/3 atau sekitar 33,33%.	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	$\frac{(\text{Ipar} + \text{IKeputusan} + \text{IPendapatan})}{3}$	Badan Pusat Statistik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • IDG: Indeks Pemberdayaan Gender. • Ipar: Indeks Keterwakilan Perempuan di Parlemen. • IKeputusan: Indeks Pengambilan Keputusan, Persentase perempuan yang menduduki jabatan sebagai tenaga profesional, teknisi, administrator, dan manajer. • IPendapatan: Indeks Sumbangan Pendapatan Proporsi atau sumbangan pendapatan kerja perempuan terhadap total pendapatan.		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		23. Indeks Perlindungan Anak	Indeks	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ Dimana: • W_j: bobot Klaster ke-j dalam pembentukan IPA. • Indeks K_j: nilai indeks Klaster ke-j setelah indikator-indikator penyusunnya dinormalisasi dan diagregasikan. • Klaster : Klaster I: Sipil dan Kebebasan Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya Klaster V: Perlindungan Khusus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

1. SEKRETARIAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Fungsi Sekretariat Daerah dalam Menunjang Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten	1. Persentase Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat}}{\text{Target Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian, dan Administrasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat}} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2. Persentase Kinerja, Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi	Persen	$\frac{\text{Realisasi Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian, dan Layanan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi}}{\text{Target Kinerja Perumusan Kebijakan, Pengoordinasian, dan Administrasi Bidang Pembangunan dan Ekonomi}} \times 100$	Sekretarian Daerah	Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	3. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Sekretariat Daerah

2. SEKRETARIAT DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	$\frac{\text{Jumlah Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Tugas dan Fungsi DPRD yang Direncanakan}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Tugas dan Fungsi DPRD yang Difasilitasi adalah jumlah tugas dan fungsi DPRD yang telah mendapatkan fasilitasi/dukungan dari Sekretariat DPRD pada periode pengukuran. - Jumlah Tugas dan Fungsi DPRD yang Direncanakan adalah jumlah tugas dan fungsi DPRD yang ditetapkan untuk mendapatkan fasilitasi dalam periode pengukuran. - Fasilitasi mencakup dukungan layanan, anggaran, dan koordinasi untuk menunjang fungsi utama DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
2.	Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen	Inspektorat	Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

3. INSPEKTORAT DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Skor SPIP = (40% x Skor Penetapan Tujuan) + (30% x Skor Struktur dan Proses) + (30% x Pencapaian Tujuan) Dimana: - Skor penetapan tujuan menggambarkan kualitas penetapan tujuan organisasi, dengan ruang lingkup utama kualitas sasaran strategis dan kualitas strategi pencapaian sasaran strategis - Skor struktur dan proses menggambarkan kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, dengan ruang lingkup utama lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. - Skor pencapaian tujuan menggambarkan pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP, dengan ruang lingkup utama efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Daerah
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Skor Kapabilitas APIP = (40% x Nilai Elemen Kualitas Peran dan Layanan) + (20% x Nilai Elemen Profesionalisme Penugasan) + (20% x Nilai Elemen Pengawasan) + (10% x Nilai Elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan) + (10% x Nilai Elemen Budaya dan Hubungan)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Inspektorat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Matriks Level Kapabilitas Berdasarkan Skor: $\text{Skor} = \Sigma (\text{Nilai Elemen} \times \text{Nilai Bobot})$ Dimana: • Nilai Elemen Kualitas Peran dan Layanan: Mengukur sejauh mana hasil pengawasan APIP memberikan nilai tambah (value added), saran strategis, serta efektivitas konsultasi dan penjaminan (assurance) bagi tata kelola pemerintah Bobot Elemen: Bobot yang ditetapkan untuk masing-masing elemen sesuai metodologi penilaian Kapabilitas APIP yang berlaku. • Nilai Elemen Profesionalisme Penugasan: Menilai kepatuhan terhadap standar audit/pengawasan, kecukupan perencanaan per penugasan, pelaksanaan metodologi yang baku, serta pengendalian mutu (quality control) selama audit berjalan. • Nilai Elemen Pengawasan: Mengukur cakupan, ruang lingkup, dan objektivitas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan internal (audit, evaluasi, reviu, pemantauan) terhadap area-area berisiko tinggi. • Nilai Elemen Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya: Menilai manajemen internal APIP, mencakup perencanaan anggaran pengawasan, pengelolaan SDM (kompetensi, diklat, dan sertifikasi auditor), serta pengukuran kinerja intern APIP. • Nilai Elemen Budaya dan Hubungan: Mengukur hubungan kerja kolaboratif antara APIP dengan pihak eksternal, audit internal instansi lain, pimpinan daerah/lembaga, serta budaya independensi dan integritas organisasi.		
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	3. Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = $(60\% \times \text{Skor Pengungkit}) + (40\% \times \text{Skor Hasil})$ Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

4. DINAS PENDIDIKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya serta Meratanya Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar}}{\text{Total penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$ Dimana: - Pembilang adalah jumlah penduduk usia 7–12 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/ sederajat), baik melalui jalur formal maupun non formal. - Penyebut adalah total penduduk usia 7–12 tahun. - Indikator digunakan untuk mengukur akses dan pemerataan layanan pendidikan dasar serta keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2. Jumlah Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama}}{\text{Total penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$ Dimana: - Pembilang adalah jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs/ sederajat), baik melalui jalur formal maupun non formal. - Penyebut adalah total penduduk usia 13-15 tahun. - Indikator digunakan untuk mengukur akses dan pemerataan layanan pendidikan serta	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				keberhasilan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.		
		3. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS)	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 – 6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada layanan pendidikan anak usia dini}}{\text{Total penduduk usia 5 – 6 tahun}} \times 100$ Dimana: • Pembilang adalah jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan pada layanan pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/RA/ sederajat) sesuai cakupan data yang digunakan Dinas Pendidikan. • Penyebut adalah total penduduk usia 5-6 tahun. • Indikator digunakan untuk mengukur akses dan pemerataan partisipasi pendidikan anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan}}{\text{Total penduduk usia 7 – 18 tahun}} \times 100$ Dimana: • Pembilang adalah jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C. • Penyebut adalah total penduduk usia 7-18 tahun yang menjadi sasaran pengukuran. • Indikator digunakan untuk mengukur akses masyarakat usia sekolah terhadap jalur pendidikan nonformal/kesetaraan sebagai alternatif atau pelengkap pendidikan formal.	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		5. Rata-Rata Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	Hasil dari Rapor Pendidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan
		6. Rata-Rata Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional	Persen	Hasil dari Rapor Pendidikan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Dinas Pendidikan
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	7. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil)	Inspektorat Daerah	Dinas Pendidikan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

5. DINAS KESEHATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$ Dimana: • Jumlah Kematian Ibu: seluruh kematian ibu yang memenuhi definisi operasional dalam wilayah pada periode pengukuran. • Jumlah Kelahiran Hidup: seluruh kelahiran hidup dalam wilayah dan periode yang sama. • Konstanta 100.000 digunakan sehingga hasil dinyatakan sebagai jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. • AKI merupakan indikator negatif. Semakin rendah angka AKI, semakin baik capaian kinerja.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2. Angka Kematian Balita	Per 1000 Kelahiran Hidup	$\frac{\text{Jumlah Kematian Balita}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$ Dimana: • Jumlah Kematian Balita: jumlah anak usia 0–59 bulan yang meninggal dalam wilayah dan kurun waktu pengukuran. • Jumlah Kelahiran Hidup: jumlah kelahiran hidup dalam wilayah dan kurun waktu yang sama.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- Konstanta 1.000 digunakan agar hasil dinyatakan sebagai jumlah kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. - Indikator ini menggambarkan risiko kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun.		
		3. Cakupan SPM Bidang Kesehatan	Persen	$\frac{\text{Hasil Pelayanan}}{\text{Sasaran Penduduk}} \times 100\%$ Dimana: - Hasil Pelayanan: Realisasi atau jumlah individu yang tercatat benar-benar menerima pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu. - Sasaran Penduduk: Total populasi atau target sasaran yang memerlukan layanan tersebut di wilayah kerja pada tahun yang sama (dihitung menggunakan estimasi demografi atau data riil). - Target pemenuhan mutu pelayanan dasar SPM Kesehatan adalah 100% setiap tahun. - Untuk SPM Kesehatan kabupaten, jenis pelayanan dasar mencakup 12 pelayanan kesehatan, antara lain pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes melitus, ODGJ berat, terduga tuberkulosis, dan risiko HIV.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	$[\Sigma (\text{Rata-rata Nilai Unsur} \times \text{Bobot Unsur})] \times 25$ Dimana: - Rata-rata Nilai Unsur: rata-rata skor persepsi masyarakat untuk setiap unsur pelayanan, dengan skala 1–4. - Bobot Unsur: 1 / jumlah unsur pelayanan. 25: nilai dasar untuk mengonversi indeks rata-rata skala 1–4 menjadi skala 25–100. - Untuk pelayanan kesehatan, unsur pelayanan disesuaikan dengan jenis layanan/unit penyelenggara, dengan tetap mengacu pada pedoman SKM yang berlaku. - Kategori hasil konversi, yaitu: ✓ 25,00–64,99 : Tidak Baik. ✓ 65,00–76,60 : Kurang Baik.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				✓ 76,61–88,30 : Baik. ✓ 88,31–100,00 : Sangat Baik.		
2.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan terhadap Masyarakat	5. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Kesehatan

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungannya yang Tertata	1. Persentase Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang Tertata	Persen	$\frac{\text{Jumlah Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang tertata}}{\text{Jumlah Seluruh Bangunan dan Lingkungan Pemerintahan yang dinilai}} \times 100$ Dimana: • Jumlah bangunan dan lingkungan pemerintahan yang tertata adalah jumlah objek yang memenuhi kriteria tertata berdasarkan inventarisasi/penilaian. • Jumlah seluruh bangunan dan lingkungan pemerintahan yang dinilai adalah seluruh objek yang menjadi sasaran penilaian pada periode pengukuran. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi bangunan dan lingkungan pemerintahan yang telah tertata.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	2. Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik) layak dan aman	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak dan Aman}}{\text{Jumlah Penduduk yang Menjadi Sasaran Pengukuran}} \times 100$ Dimana: - Jumlah penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi layak dan aman adalah jumlah penduduk yang menggunakan fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang memenuhi kriteria layak dan aman sesuai ketentuan teknis yang berlaku. - Jumlah penduduk yang menjadi sasaran pengukuran adalah seluruh penduduk dalam wilayah dan periode pengukuran yang menjadi cakupan pelayanan sanitasi. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang memperoleh akses terhadap sanitasi layak dan aman.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3.	Meningkatnya Kualitas Jalan Kabupaten	3. Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	Persen	$\frac{\text{Realisasi Jalan Mantap}}{\text{Target Jalan Mantap}} \times 100$ Dimana: - Realisasi Jalan Mantap: Panjang jalan mantap pada tahun pengukuran. - Target Jalan Mantap: Panjang jalan mantap yang ditetapkan dalam dokumen kinerja.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4.	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Terampil Konstruksi di Kabupaten Sumedang dalam Pembangunan Infrastruktur	4. Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten (IKK) yang Dibuktikan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja Kualifikasi Operator/Teknisi/Analisis	Persen	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Operator/Teknisi/Analisis}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih dan Tersertifikasi: jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator/teknisi/analisis yang terlatih dan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) yang masih berlaku dan diakui sesuai ketentuan. - Jumlah Kebutuhan Tenaga Kerja Operator/Teknisi/Analisis: jumlah kebutuhan tenaga operator/teknisi/analisis konstruksi berdasarkan proyek konstruksi yang menjadi kewenangan Kabupaten pada tahun berjalan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
5.	Meningkatnya Keselarasan dan Terintegrasinya Penataan Ruang Wilayah	5. Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan RTRW}} \times 100$ Dimana: • Realisasi RTRW: luas wilayah/pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam RTRW. • Rencana Peruntukan RTRW: luas wilayah yang direncanakan untuk fungsi atau kegiatan tertentu sesuai RTRW yang berlaku. • Persentase Ketaatan RTRW = tingkat kesesuaian realisasi pemanfaatan ruang terhadap rencana peruntukan ruang dalam RTRW. • Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin tinggi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6.	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air untuk Irigasi	6. Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	Persen	$\frac{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik}}{\text{Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten}} \times 100$ Dimana: • Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik: total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten dan memiliki kondisi fisik/kinerja jaringan irigasi kategori baik. • Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten: total luas daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. • Kategori baik: kinerja irigasi lebih dari 90% atau tingkat kerusakan kurang dari 10% berdasarkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang berada dalam kondisi baik.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7.	Meningkatnya Keberlanjutan dan Ketersediaan Air Minum	7. Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Sumedang	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM JP Terlindungi dan BJP Terlindungi}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten}} \times 100$ Dimana: • Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM JP Terlindungi dan BJP Terlindungi: jumlah penduduk yang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				memperoleh akses air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi pada wilayah Kabupaten. • Jumlah Penduduk Kabupaten: total penduduk Kabupaten pada tahun/periode pengukuran yang sama. • SPAM JP Terlindungi: akses air minum melalui sistem jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria pelayanan/terlindungi sesuai ketentuan teknis yang berlaku. • SPAM BJP Terlindungi: akses air minum bukan melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sumber air terlindungi sesuai ketentuan teknis yang berlaku. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi penduduk Kabupaten yang telah memperoleh akses air minum melalui SPAM yang terlindungi.		
8.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah	8. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = $(60\% \times \text{Skor Pengungkit}) + (40\% \times \text{Skor Hasil})$ Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Pelayanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan	1. Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	$\frac{\text{Jumlah unit rumah di Perumahan yang PSUnya sudah ditangani}}{\text{Jumlah unit perumahan yang sudah diserahkan terimakan}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		2. Pengentasan Luasan Kawasan Kumuh	Hektar	Luas Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		3. Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	Persen	$\frac{\text{Realisasi Pengadaan Tanah}}{\text{Target Pengadaan Tanah}} \times 100$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Lingkungan Sosial	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang teridentifikasi}} \times 100$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil)	Inspektorat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	1. Persentase Penanggulangan Pra Bencana	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pra Bencana yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Target Kegiatan Pra Bencana}} \times 100$ Dimana: • Jumlah Kegiatan Pra Bencana yang Difasilitasi: jumlah kegiatan penanggulangan pada tahap pra bencana yang telah dilaksanakan/difasilitasi oleh BPBD Kabupaten pada tahun pengukuran yaitu Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten serta Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. • Jumlah Target Kegiatan Pra Bencana: jumlah target kegiatan pra bencana yang akan dilaksanakan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun pengukuran. • Indikator mengukur tingkat pemenuhan target kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, yang mencakup antara lain pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, edukasi, dan kegiatan terkait lainnya sesuai rencana kerja BPBD.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	2. Persentase Penanggulangan Tanggap Darurat Bencana	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Terjadi}} \times 100$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • Jumlah Kejadian Bencana yang Ditangani = jumlah kejadian bencana yang memperoleh penanganan tanggap darurat oleh BPBD sesuai kewenangan dan standar penanggulangan bencana pada periode pengukuran yaitu terlayannya penyelamatan dan evakuasi korban bencana. • Jumlah Kejadian Bencana yang Terjadi = seluruh kejadian bencana yang tercatat di wilayah Kabupaten pada periode pengukuran. • Penanganan tanggap darurat meliputi respons/penanganan kedaruratan, antara lain kaji cepat, aktivasi/koordinasi penanganan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kondisi bencana. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi kejadian bencana yang dapat ditangani pada tahap tanggap darurat.		
3.	Meningkatnya Penanggulangan Bencana	3. Persentase Penanggulangan Pasca Bencana	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kejadian atau Objek Pasca Bencana yang Ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian atau Objek Pasca Bencana yang Memerlukan Penanganan}} \times 100$ Dimana: • Jumlah Kejadian atau Objek Pasca Bencana yang Ditangani: jumlah kejadian atau objek terdampak bencana yang telah memperoleh penanganan pasca bencana sesuai kewenangan BPBD yaitu pendampingan dan monitoring pasca bencana. • Jumlah Kejadian atau Objek Pasca Bencana yang Memerlukan Penanganan: seluruh kejadian atau objek terdampak yang berdasarkan hasil kaji kebutuhan pasca bencana memerlukan penanganan rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pada periode pengukuran. • Penanganan pasca bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat, pelayanan publik, sarana-prasarana, serta fungsi lingkungan sesuai ketentuan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi kebutuhan penanganan pasca bencana yang telah ditindaklanjuti.		
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

10. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Cakupan Layanan Kebakaran dan Non Kebakaran Sesuai dengan Prosedur (Response Time)	1. Cakupan Response Time Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Ditangani Sesuai Standar Waktu Tanggap}}{\text{Jumlah Seluruh Laporan atau Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Kejadian yang Ditangani Sesuai Standar Waktu Tanggap: jumlah laporan/kejadian kebakaran dan non kebakaran yang memperoleh respons/penanganan sesuai batas waktu tanggap yang ditetapkan dalam standar pelayanan. - Jumlah Seluruh Laporan/Kejadian: seluruh laporan atau kejadian kebakaran dan non kebakaran yang masuk dan menjadi kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada periode pengukuran. - Standar waktu tanggap: batas waktu respons yang ditetapkan dalam standar pelayanan; untuk layanan kebakaran pada wilayah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				manajemen kebakaran, standar yang umum digunakan adalah maksimal 15 menit. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi laporan/kejadian yang ditangani sesuai standar waktu tanggap.		
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

11. DINAS SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Layanan Dasar Bagi PPKS.	1. Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS SPM Bidang Sosial	Persen	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang Menjadi Sasaran SPM}} \times 100$ Dimana: • Jumlah PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Layanan Dasarnya: jumlah warga negara/PPKS yang telah menerima dan terpenuhi kebutuhan layanan dasar sesuai standar teknis SPM Sosial. • Jumlah PPKS yang menjadi Sasaran SPM: jumlah warga negara/PPKS yang menjadi target penerima layanan SPM bidang sosial pada periode dan wilayah pengukuran. • PPKS: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi sasaran PPKS yang kebutuhan layanan dasarnya telah terpenuhi.	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar bagi PPKS Non SPM Bidang Sosial	Persen	$\frac{\text{Jumlah PPKS Non SPM yang Menerima Layanan}}{\text{Jumlah PPKS Non SPM Sasaran Layanan}} \times 100$ Dimana: - Jumlah PPKS Non SPM yang Menerima Layanan: jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar sasaran SPM yang telah memperoleh layanan sosial sesuai program/kegiatan Pemerintah Daerah pada periode pengukuran. - Jumlah PPKS Non SPM Sasaran Layanan: jumlah PPKS di luar sasaran SPM yang teridentifikasi dan menjadi sasaran pelayanan sosial Pemerintah Daerah pada periode dan wilayah yang sama. - PPKS: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar cakupan PPKS Non SPM yang memperoleh layanan sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Sosial/PSKS	3. Persentase Kelembagaan Sosial/PSKS yang Memberikan Pelayanan Sosial	Persen	$\frac{\text{Jumlah Kelembagaan Sosial atau PSKS yang Memberikan Pelayanan Sosial}}{\text{Jumlah Kelembagaan Sosial atau PSKS yang Terdata}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Kelembagaan Sosial/PSKS yang Memberikan Pelayanan Sosial: jumlah lembaga/organisasi atau Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang pada periode pengukuran aktif memberikan pelayanan atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Jumlah Kelembagaan Sosial/PSKS yang Terdata: seluruh kelembagaan sosial/PSKS yang teridentifikasi dan terdata dalam wilayah Kabupaten pada periode pengukuran. - PSKS: Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi kelembagaan sosial/PSKS yang aktif memberikan pelayanan sosial.	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Sosial

12. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kompetensi dan Penempatan Tenaga Kerja	1. Persentase Tenaga kerja yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan: jumlah keseluruhan pencari kerja yang terdaftar dan kemudian melaporkan/tercatat telah diterima bekerja dan ditempatkan, baik di dalam maupun di luar negeri, melalui mekanisme layanan antar kerja. - Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar: jumlah keseluruhan pencari kerja yang mendaftar sebagai pencari kerja pada layanan ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten pada periode pengukuran. - Indikator mengukur efektivitas layanan antar kerja dalam menempatkan pencari kerja ke dalam pekerjaan, baik dalam maupun luar negeri. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi pencari kerja terdaftar yang berhasil ditempatkan melalui layanan antar kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		2. Persentase Peserta Pelatihan yang Bersertifikat	Persen	$\frac{\text{Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah Peserta Pelatihan}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Peserta Pelatihan yang Bersertifikat Kompetensi: jumlah peserta/lulusan pelatihan yang telah mengikuti proses sertifikasi dan memperoleh Sertifikat Kompetensi dari lembaga yang berwenang atau diakui. - Jumlah Peserta Pelatihan: seluruh peserta/lulusan pelatihan kerja yang menjadi cakupan pengukuran pada periode yang sama. - Indikator mengukur proporsi peserta pelatihan kerja yang berhasil memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat kompetensi.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.	Terciptanya Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis, dan Berkeadilan	3. Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan}	Persen	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak: jumlah perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan tata kelola kerja yang ditetapkan untuk indikator, yaitu memiliki PP atau PKB, memiliki Struktur dan Skala Upah, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta membentuk LKS Bipartit bagi perusahaan yang memenuhi ketentuan wajib pembentukan LKS Bipartit. - Jumlah Perusahaan: seluruh perusahaan yang terdata/terdaftar dalam wilayah Kabupaten yang menjadi cakupan pengukuran. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi perusahaan yang memenuhi tata kelola kerja yang layak.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Meningkatnya Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	4. Jumlah Transmigran yang Ditempatkan dan Difasilitasi	KK	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal	5. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil)	Inspektorat Daerah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Poin	$I_{\text{Governance}} + I_{\text{Efektivitas dan Efisiensi}}$ Dimana: • I Governance: indeks tata kelola/pengelolaan sampah yang terdiri atas parameter input dan proses. • I Efektivitas dan Efisiensi: indeks yang menilai parameter output, outcome, dan dampak pengelolaan sampah. • Komponen Governance mencakup kebijakan, SDM, sarana/prasarana, anggaran, sosialisasi dan pemahaman, serta acceptability dan implementasi. • Komponen Efektivitas dan Efisiensi mencakup capaian output, efisiensi anggaran, outcome/kebersihan kota, dan dampak yang antara lain menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA). • Nilai IKPS berada pada skala 0–100 poin. Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik kinerja pengelolaan sampah.	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.	Meningkatnya Pengembangan Generasi Lingkungan	2. Persentase Peningkatan Generasi Lingkungan	Persen	$\frac{(\text{Jumlah PGL s. d Thn Lalu} + \text{Jumlah PGL hasil pembinaan thn ini}) - (\text{Jumlah PGL sd Thn Lalu})}{\text{Jumlah PGL s. d Tahun Lalu}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Kualitas Air	3. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	$IKA = \frac{\text{Titik Pantau}}{\text{Jumlah Titik Pantau}}$ $IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$ Dimana: w = faktor pembobot I = sub – indeks (Q-Nilai) IKA Titik Pantau = Sub Total (pH + BOD + COD + TSS + DO + NO3-N + T-P + <i>fecal coli</i>)	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.	Meningkatnya Kualitas Udara	4. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	$100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0.01) \right)$ Dimana: • $I_{INA} = \frac{(\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2.5})}{3}$ • Indeks NO₂: $\frac{\text{Konsentrasi Rata-rata Tahunan NO}_2}{\text{Buku Mutu udara Ambien Tahunan NO}_2}$ • Indeks SO₂: $\frac{\text{Konsentrasi Rata-rata Tahunan SO}_2}{\text{Buku Mutu Udara Ambien Tahunan SO}_2}$ • Indeks PM_{2.5}: $\frac{\text{Konsentrasi Rata-rata Tahunan PM}_{2.5}}{\text{Buku Mutu Udara Ambien Tahunan PM}_{2.5}}$	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	5. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	$100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$ Dimana: • $TL = \frac{\sum i = (\text{Luas Kelas Tutupan} \times Ci)}{\sum i = (\text{Luas Kelas Tutupan})}$	Kementerian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6.	Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	6. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab kegiatan/usaha yang taat}}{\text{Jumlah kegiatan/usaha yang dilakukan pengawasan}} \times 100$	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7.	Meningkatnya Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	7. Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (TAHURA)	Poin	$\frac{\text{Total Skor yang Diperoleh}}{\text{Total Skor Maksimum}} \times 100$ Dimana: • Total Skor yang diperoleh: jumlah skor hasil penilaian seluruh indikator dalam instrumen METT (Management Effectiveness Tracking Tool) pada Tahura. • Total Skor Maksimum: skor maksimum seluruh indikator dalam instrumen METT yang	Kementerian Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				digunakan. Pada instrumen METT yang digunakan dalam pedoman penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, skor maksimum keseluruhan adalah 90. • Penilaian mencakup enam elemen utama: konteks, perencanaan, input, proses, output, dan outcome. • Nilai akhir dinyatakan dalam persen/poin pada skala 0–100. Nilai tersebut menggambarkan tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. • Sebagai klasifikasi operasional yang digunakan dalam penilaian METT: 0–22 = tidak efektif; 23–45 = cukup efektif; 46–68 = efektif; 69–90 = sangat efektif. • Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin efektif pengelolaan Tahura dalam mencapai tujuan konservasi.		
8.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	8. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = $(60\% \times \text{Skor Pengungkit}) + (40\% \times \text{Skor Hasil})$ Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Cakupan Kepemilikan Identitas Penduduk	Persen	$\frac{\% \text{Kepemilikan Kartu Keluarga} + \% \text{Kepemilikan KTP Elektronik} + \% \text{Kepemilikan KIA}}{3}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Cakupan Kepemilikan Akta Catatan Sipil	Persen	$\frac{\% \text{Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 17 Tahun} + \% \text{Kepemilikan Akte Kematian} + \% \text{Kepemilikan Akte Perkawinan}}{3}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
		3. Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	$\frac{\text{Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan}}{\text{Jumlah instansi}} \times 100$	Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal perangkat Daerah	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya Desa Mandiri	1. Persentase Desa Mandiri	Persen	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Desa Mandiri: jumlah desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa pada tahun pengukuran. - Jumlah Seluruh Desa: seluruh desa yang berada dalam wilayah Kabupaten dan menjadi cakupan pengukuran pada tahun yang sama. - Desa Mandiri: desa dengan nilai Indeks Desa 79,63% sampai dengan 100% sesuai klasifikasi Indeks Desa - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi desa yang telah mencapai status Desa Mandiri.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2.	Meningkatnya Kapasitdas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

16. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Optimalisasi Pengendalian Penduduk Melalui Keluarga Berencana	1. Total Fertility Rate (TFR)	Orang	$\frac{5}{1000} \times \sum_{i=1}^7 ASFR_1$ Dimana : $ASFR_1 = \frac{B_i}{P_i} \times 1000$ - ASFR_i: Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur pada kelompok umur perempuan ke-i. - B_i: jumlah kelahiran hidup yang berasal dari perempuan pada kelompok umur i selama periode pengukuran. - P_i: jumlah perempuan pada kelompok umur i pada pertengahan periode pengukuran. - Kelompok umur i: 15–19; 20–24; 25–29; 30–34; 35–39; 40–44; dan 45–49 tahun. - Semakin tinggi TFR menunjukkan semakin tinggi tingkat fertilitas. TFR sekitar 2,1 anak per perempuan sering digunakan sebagai tingkat reproduksi pengganti (replacement level).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.	2. Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	Dihitung berdasarkan tujuh komponen kunci yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, dan Partisipasi Masyarakat.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dari Perlindungan Khusus Anak.	3. Nilai dalam Kabupaten Layak Anak (KLA)	Nilai	Σ Nilai Seluruh Indikator Evaluasi KLA Dimana: • Σ Nilai Seluruh Indikator Evaluasi KLA: jumlah skor seluruh indikator yang dinilai dalam Instrumen Evaluasi KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. • Instrumen Evaluasi KLA tingkat Kabupaten memberikan bobot nilai maksimum 1.000 dan nilai minimum 500, serta memuat 24 indikator yang berasal dari aspek kelembagaan dan 5 klaster substantif hak anak, ditambah komponen untuk melihat penyelenggaraan KLA pada kecamatan dan desa/kelurahan. • Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik capaian penyelenggaraan KLA. • Kategori Peringkat KLA, yaitu: ✓ 501–600: Pratama. ✓ 601–700: Madya. ✓ 701–800: Nindya. ✓ 801–900: Utama. ✓ 901–1.000: Kabupaten Layak Anak.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = $(60\% \times \text{Skor Pengungkit}) + (40\% \times \text{Skor Hasil})$ Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

17. DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur sebagai Penunjang Perekonomian	1. Cakupan Kelancaran, keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen	$\frac{X1 + X2}{2}$ Dimana: • X1: Persentase Trayek Angkutan Jalan yang Dilayani $X1 = \frac{\text{Jumlah trayek angkutan jalan yang dilayani}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek angkutan jalan yang menjadi kewenangan daerah}} \times 100$ • X2: Persentase Pemasangan dan Rehabilitasi Perlengkapan dan Fasilitas Jalan $X2 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan dan fasilitas jalan yang terpasang dan/atau direhabilitasi}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan dan fasilitas jalan}} \times 100$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspktorat Daerah	Dinas Perhubungan

18. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	1. Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	Persen	$\frac{\text{Jumlah Responden yang memahami Program Unggulan}}{\text{Jumlah Seluruh Responden}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Responden yang Memahami Program Unggulan: jumlah responden hasil survei yang memenuhi kriteria pemahaman terhadap program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. - Jumlah Seluruh Responden Survei: seluruh responden yang menjadi sampel survei pemahaman masyarakat pada periode pengukuran. - Penilaian dilakukan melalui survei/kuisisioner dengan pertanyaan atau skor yang ditetapkan dalam instrumen survei. Batas skor yang dikategorikan 'memahami' harus ditetapkan dalam metodologi survei sebelum penghitungan. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi masyarakat yang memahami program-program unggulan Pemerintah Daerah.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	$80\%(\text{SAQ}) + 20\% (\text{Nilai Presentasi})$ Dimana: - Penilaian berdasarkan Pengisian <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) dan Tahap Presentasi dengan penilaian SAQ berdasarkan 5 Indikator: - Mengumungkan Informasi Berkala (25) - Menyediakan Dokumen Informasi (10) - Mengembangkan Website (25) - Mengumungkan Pengadaan Barang dan Jasa (15) - Kelembagaan (25)	Komisi Informasi Pusat	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	3. Indeks Layanan SPBE	Poin	$\frac{(\text{NA}_7 \times 27,5) + (\text{NA}_8 \times 18)}{45,5}$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • NA₇/Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik mencakup 10 indikator layanan administrasi pemerintahan. • NA₈/Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik mencakup 6 indikator layanan publik. • Penilaian setiap aspek berasal dari tingkat kematangan indikator-indikatornya pada skala 1 sampai 5.	Birokrasi	
		4. Nilai Kematangan Teknologi Digital	Poin	$\frac{(N_{13} \times 4\%) + (N_{14} \times 5\%)}{9\%}$ Dimana: • N₁₃: Nilai Tingkat Kematangan Aplikasi Pemerintah Digital (Indikator 13). • N₁₄: Nilai Tingkat Kematangan Infrastruktur Pemerintah Digital (Indikator 14). • 4%: bobot Indikator 13. • 5%: bobot Indikator 14. • 9%: total bobot kedua indikator pada Aspek Teknologi Digital. • Nilai masing-masing indikator ditentukan berdasarkan tingkat kematangan hasil evaluasi Pemerintah Digital dengan skala 1 sampai 5. • Nilai Kematangan Teknologi Digital menggambarkan tingkat kematangan pemerintah dalam membangun/ mengembangkan aplikasi digital serta menyediakan dan memanfaatkan infrastruktur digital pemerintah. • Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin matang penerapan teknologi digital pemerintah. • Interpretasi tingkat kematangan: ✓ Level 1 (Initiate/Rintisan) = >1,00 sampai <1,50. ✓ Level 2 (Emerging/Membangun) = >1,50 sampai <2,50. ✓ Level 3 (Developing/Berkembang) = >2,50 sampai <3,50. ✓ Level 4 (Embedded/Melebaga) = >3,50 sampai <4,00. ✓ Level 5 (Leading/Unggul) = >4,00 sampai 5,00.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	5. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	$\sum_{k=1}^K (\text{Nilai Indeks Domain}_k \times \text{Bobot Domain}_k)$ Dimana: • Nilai Indeks Domain_k: nilai masing-masing domain penilaian EPSS. • Bobot Domain_k: bobot masing-masing domain sesuai metodologi EPSS yang ditetapkan BPS • IPS dihitung dengan mengagregasikan nilai domain, aspek, dan indikator secara berbobot sesuai instrumen EPSS. • Semakin tinggi nilai IPS menunjukkan semakin matang dan semakin baik kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. • Kategori tingkat kematangan: ✓ 1,00-<2,00: Rintisan. ✓ 2,00-<3,00: Terdefinisi. ✓ 3,00-<4,00: Terpadu dan Terukur. ✓ 4,00-5,00: Optimum.	Badan Pusat Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		6. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persen	$\frac{\text{Jumlah Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip SDI}}{\text{Jumlah Total Data Statistik Sektoral}} \times 100$ Dimana: • Jumlah Data Statistik Sektoral yang Memenuhi Prinsip SDI: jumlah data statistik sektoral yang tersedia dan telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, yaitu memiliki standar data, metadata, kode referensi dan/atau data induk yang sesuai, serta memenuhi ketentuan interoperabilitas data. • Jumlah Total Data Statistik Sektoral: seluruh data statistik sektoral yang menjadi daftar data/objek pengukuran pada periode dan wilayah yang sama. • Data dinyatakan sesuai prinsip SDI apabila seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam metadata indikator telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dengan dokumen/eviden. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi data statistik sektoral yang tersedia sekaligus memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
4.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	7. Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	Indeks KAMI= Total Skor Perarea Dimana: • Terdiri dari 8 area penilaian • Setiap area memiliki format yang sudah di tentukan dengan Tingkat kematangan: ✓ Tingkat 1: telah dilakukan ✓ Tingkat 2: dalam Perencanaan ✓ Tingkat 3: diterapkan Sebagian ✓ Tingkat 4: diterapkan Menyeluruh	Badan Siber dan Sandi Negara	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	8. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

19. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas di Kabupaten Sumedang	1. Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	$\frac{VU_n - VU_{n-1}}{VU_{n-1}} \times 100$ Dimana: • VU_n: Volume usaha koperasi pada tahun/periode berjalan (tahun n). • VU_{n-1}: Volume usaha koperasi pada tahun/periode sebelumnya (tahun n-1). • Volume usaha koperasi: nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan koperasi dalam satu periode/tahun buku, sesuai cakupan data yang digunakan.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				- Selisih $VU_n - VU_{n-1}$ menunjukkan perubahan volume usaha dibandingkan periode sebelumnya. - Nilai positif menunjukkan volume usaha koperasi meningkat; nilai negatif menunjukkan volume usaha koperasi menurun; nilai 0% menunjukkan tidak terjadi perubahan.		
2.	Meningkatnya Usaha Mikro di Kabupaten Sumedang	2. Pertumbuhan Wirausaha	Persen	$\frac{\text{Jumlah Penambahan NIB}_n}{\text{Jumlah Penambahan NIB}_{n-1}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Pertumbuhan Pelaku UMKM yang memiliki NIB. - Pertumbuhan tersebut dihitung dari persentase jumlah UMKM yang memiliki NIB Tahun n dibagi jumlah UMKM yang memiliki NIB tahun n-1 dikali 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
3.	Meningkatnya Volume Perdagangan	3. Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah Ijin saran teknis yang diterbitkan}}{\text{Jumlah yang mengusulkan ijin saran teknis}} \times 100$ Dimana: Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang memiliki Perijinan saran Teknis dihitung dengan Jumlah Ijin saran teknis tersebut dihitung dari Persentase Jumlah Izin saran teknis yang diterbitkan (N) dibagi jumlah yang mengusulkan izin saran teknis (N1) dikali 100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
4.	Peningkatan Unit Usaha Industri Baru	4. Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Persen	$\frac{\text{Jumlah Akun Sinas Tahun}_n - \text{Jumlah Akun Sinas Tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah Akun Sinas Tahun}_{n-1}} \times 100$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5.	Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	5. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

20. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Sumedang	1. Nilai Investasi di Kabupaten Sumedang	Rupiah	$\sum \text{Nilai Realisasi PMDN} + \sum \text{Nilai Realisasi PMA}$ Dimana: - Nilai Realisasi PMDN: jumlah nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri pada proyek yang berlokasi di Kabupaten berdasarkan LKPM yang diterima dan diolah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. - Nilai Realisasi PMA: jumlah nilai realisasi Penanaman Modal Asing pada proyek yang berlokasi di Kabupaten berdasarkan LKPM yang diterima dan diolah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. - Nilai Investasi Kabupaten: total nilai realisasi PMDN dan PMA pada wilayah Kabupaten dalam periode pengukuran. - Semakin besar nilai menunjukkan semakin besar realisasi penanaman modal yang terjadi di Kabupaten. - Data bersumber dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaan PMA dan PMDN yang diterima Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	$\text{Skor Akhir ZI} = (60\% \times \text{Skor Pengungkit}) + (40\% \times \text{Skor Hasil})$ Dimana: Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

21. DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	1. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Usia 16 – 30 Tahun yang Berwirausaha}}{\text{Jumlah Pemuda Usia 16 – 30 Tahun}} \times 100$ Dimana: - Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Berwirausaha: jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang berperan sebagai pelaku usaha ekonomi/berwirausaha dan dapat dibuktikan melalui data administrasi pemerintah daerah atau sumber data resmi lainnya. - Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun: seluruh penduduk berusia 16–30 tahun yang berdomisili/tercatat dalam wilayah Kabupaten pada periode pengukuran. - Kegiatan ekonomi mandiri mencakup kegiatan pemuda sebagai pelaku usaha/berwirausaha, termasuk usaha mikro, usaha berbasis digital, kreatif, konvensional, atau usaha rumahan sesuai cakupan yang ditetapkan dalam metadana. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		2. Tingkat Pemuda Partisipasi dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Usia 16 – 30 Tahun yang menjadi Anggota Aktif Orgaisasi}}{\text{Jumlah Pemuda Usia 16 – 30 Tahun}} \times 100$ Dimana: Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun yang Menjadi Anggota Aktif Organisasi: jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang tercatat sebagai anggota aktif	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				pada organisasi kepemudaan dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten. - Jumlah Pemuda Usia 16–30 Tahun: seluruh penduduk usia 16–30 tahun di Kabupaten berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK. - Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda yang sekurang-kurangnya memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan, serta AD/ART. - Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. - Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi pemuda yang aktif berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.		
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	Jumlah Medali/Penghargaan yang diraih Atlet tahun $n + n-1$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Meningkatnya Ketahanan Budaya Daerah	4. Presentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	Persen	$\frac{\text{Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu}}{\text{Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang terdata}} \times 100$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3.	Meningkatnya Investasi Sektor Pariwisata	5. Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah kamar terjual/terisi}}{\text{Jumlah Kamar tersedia}} \times 100$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
4.	Mengembangkan Subsektor Ekonomi Kreatif	6. Cakupan Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan}}{\text{Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan daerah}} \times 100$	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
5.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah.	7. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan,	Inspektorat Daerah	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

22. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	$\frac{\sum UPLM_i}{7} \times 100$ Dimana: • UPLM 1: Pemerataan layanan perpustakaan. • UPLM 2: Ketercukupan koleksi. • UPLM 3: Ketercukupan tenaga perpustakaan. • UPLM 4: Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan. • UPLM 5: Perpustakaan berSNP. • UPLM 6: Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan. • UPLM 7: Anggota perpustakaan.	Perpustakaan Nasional	Dinas Arsip dan Perpustakaan
2.	Meningkatnya Tata Kelola Arsip	2. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	$IHPKpd = 0,6 \text{ NHPe} + 0,4 \text{ NHPi}$ Dimana: • NHPe: Nilai Hasil Pengawasan dan Kearsipan Eksternal • NHPi: Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Arsip Nasional	Dinas Arsip dan Perpustakaan
3.	Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	3. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah	Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

23. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas dan Terjangkau	1. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	$IKP_j = \sum_{i=1}^{12} a_i \times X_{ij}$ Dimana: - IKP_j: Indeks Ketahanan Pangan untuk wilayah kabupaten ke-j. - a_i: bobot indikator ke-i. - X_{ij}: nilai indikator ke-i pada wilayah j setelah dinormalisasi/ditransformasi ke skala 0–100 sesuai arah indikator. - Σ: penjumlahan seluruh indikator yang digunakan dalam metodologi IKP tahun berjalan. - IKP merupakan indeks komposit yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan wilayah dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan, dan pemanfaatan pangan serta gizi dan keamanan pangan. - Satuan: indeks/skor, umumnya pada skala 0–100. - Semakin tinggi nilai IKP menunjukkan semakin tinggi tingkat ketahanan pangan; semakin rendah nilai menunjukkan semakin rentan terhadap kerawanan pangan.	Badan Pangan Nasional	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian	2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun}_n - \text{Produksi Tanaman Pangan Tahun}_{n-1}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun}_{n-1}} \times 100$ Dimana: - Produksi Tanaman Pangan Tahun n: total produksi komoditas Tanaman Pangan pada tahun berjalan. - Produksi Tanaman Pangan Tahun n-1: total produksi komoditas Tanaman Pangan pada tahun sebelumnya.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan: persentase perubahan produksi Tanaman Pangan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. • Nilai positif menunjukkan peningkatan produksi; nilai negatif menunjukkan penurunan; nilai 0% menunjukkan tidak ada perubahan.		
		3. Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	$\frac{\text{Produksi Hortikultura Tahun}_n - \text{Produksi Hortikultura Tahun}_{n-1}}{\text{Produksi Hortikultura Tahun}_{n-1}} \times 100$ Dimana: • Produksi Hortikultura Tahun n: total produksi komoditas hortikultura pada tahun berjalan. • Produksi Hortikultura Tahun n-1: total produksi komoditas hortikultura pada tahun sebelumnya. • Peningkatan Produksi Hortikultura: persentase perubahan produksi hortikultura tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. • Nilai positif menunjukkan peningkatan produksi; nilai negatif menunjukkan penurunan; nilai 0% menunjukkan tidak ada perubahan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		4. Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	$\frac{\text{Produksi Perkebunan Tahun}_n - \text{Produksi Perkebunan Tahun}_{n-1}}{\text{Produksi Perkebunan Tahun}_{n-1}} \times 100$ Dimana: • Produksi Perkebunan Tahun n: total produksi komoditas Perkebunan pada tahun berjalan. • Produksi Perkebunan Tahun n-1: total produksi komoditas Perkebunan pada tahun sebelumnya. • Peningkatan Produksi Perkebunan: persentase perubahan produksi Perkebunan tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. • Nilai positif menunjukkan peningkatan produksi; nilai negatif menunjukkan penurunan; nilai 0% menunjukkan tidak ada perubahan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	5. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan,	Inspektorat Daerah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

24. DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1. Peningkatan Produksi Perikanan	Persen	$\frac{\text{Produksi Perikanan Tahun } n - \text{Produksi Perikanan Tahun } n-1}{\text{Produksi Perikanan Tahun } n-1} \times 100$ Dimana: - Produksi Tahun n: total produksi perikanan pada tahun berjalan, dalam satuan produksi yang ditetapkan. - Produksi Tahun n-1: total produksi perikanan pada tahun sebelumnya dengan cakupan dan satuan yang sama. - Peningkatan Produksi Perikanan: persentase perubahan/pertumbuhan produksi perikanan tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. - Cakupan produksi dapat meliputi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya sesuai metadata indikator daerah. - Nilai positif menunjukkan peningkatan produksi, nilai negatif menunjukkan penurunan, dan 0% menunjukkan tidak terjadi perubahan.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan
2.	Meningkatnya Produktivitas Peternakan	2. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	$\frac{\text{Produksi Komoditas Peternakan Tahun } n - \text{Produksi Komoditas Peternakan Tahun } n-1}{\text{Produksi Komoditas Peternakan Tahun } n-1} \times 100$ Dimana: - Produksi Tahun n: jumlah produksi komoditas peternakan pada tahun berjalan. - Produksi Tahun n-1: jumlah produksi komoditas peternakan pada tahun sebelumnya dengan cakupan komoditas dan satuan yang sama.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				• Produksi komoditas peternakan dapat mencakup produksi daging, telur, susu, atau komoditas hasil peternakan lain sesuai cakupan yang ditetapkan dalam metadata indikator daerah. • Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan = persentase perubahan produksi pada tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. • Nilai positif menunjukkan peningkatan produksi; nilai negatif menunjukkan penurunan; dan nilai 0% menunjukkan tidak terjadi perubahan.		
3.	Terkendalnya Penyebaran Penyakit Menular Strategis pada Hewan	3. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis Diperoleh dari Surveyance Penyakit dari 5 PHMS	Persen	$\frac{\text{Luas wilayah terkendala dari PHMS}}{\text{Luas Wilayah yang Terdampak PHMS}} \times 100$ Dimana: • PW-PHMS: Persentase Luas Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis. • Luas Wilayah yang Terkendali dari PHMS: Luas wilayah kabupaten yang berdasarkan hasil surveilans dan tindakan pengendalian dinyatakan bebas atau terkendali dari PHMS sesuai kriteria yang berlaku. • Luas Wilayah yang Terdampak PHMS: Luas wilayah kabupaten yang teridentifikasi terdampak atau menjadi wilayah sasaran pengendalian PHMS dalam periode pengukuran. • Surveilans penyakit: kegiatan pengamatan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data penyakit hewan secara sistematis sebagai dasar penetapan status dan tindakan pengendalian. • PHMS yang dicakup mengikuti daftar penyakit strategis pada tahun pengukuran dan metadata daerah; antara lain Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, dan PMK. • Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin besar proporsi luas wilayah terdampak yang berhasil dikendalikan.	Dinas Perikanan dan Peternakan	Dinas Perikanan dan Peternakan
4.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil)	Inspektorat Daerah	Dinas Perikanan dan Peternakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kinerja Perangkat	1. Persentase Capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah	Persen	$\frac{\text{Jumlah IKU Perangkat Daerah yang tercapai}}{\text{Jumlah IKU Perangkat Daerah}} \times 100$	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Inovasi Daerah dalam Rangka Pencapaian Indeks Inovasi Daerah	2. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan}}{\text{Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dihasilkan}} \times 100$	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
		3. Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah.	Persen	$\frac{\text{Jumlah Inovasi yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Inovasi}} \times 100$	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	4. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	Inspektorat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalitas ASN	1. Indeks Sistem Merit	Poin	Penerapan Sistem Merit di formulasikan melalui 8 aspek maturitas, yaitu: a. perencanaan kebutuhan dan standardisasi jabatan (10%); b. manajemen talenta (20%); c. pengelolaan kinerja (14%); d. pengembangan kompetensi (16%); e. penguatan budaya kerja dan citra institusi (10%); f. penghargaan dan pengakuan (10%); g. disiplin, pemberhentian, dan upaya administratif (10%); h. digitalisasi manajemen ASN (10%).	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = $(60\% \times \text{Skor Pengungkit}) + (40\% \times \text{Skor Hasil})$ Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

27. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya.	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

28. BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$ Dimana: Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Realisasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain	Inspektorat Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.		

29. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan dan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1. Persentase Penyelesaian Konflik	Persen	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah Total Konflik Tahun Berjalan}} \times 100$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2.	Meningkatnya Pembinaan Politik dan Demokrasi yang Inklusif	2. Tingkat Partisipasi dan Aksesibilitas Masyarakat dalam Pembangunan dan Proses Politik/Demokrasi	Persen	$\frac{\text{Jumlah pembinaan masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dan demokrasi}}{\text{Jumlah total sasaran masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan dan demokrasi}} \times 100$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	3. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: - Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. - Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

30. KECAMATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	$[\Sigma (\text{Rata-rata Nilai Unsur} \times \text{Bobot Unsur})] \times 25$ Dimana: Rata-rata Nilai Unsur: rata-rata skor persepsi masyarakat untuk setiap unsur pelayanan, dengan skala 1–4.	Kecamatan	Kecamatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				• Bobot Unsur: 1 / jumlah unsur pelayanan. • 25: nilai dasar untuk mengonversi indeks rata-rata skala 1–4 menjadi skala 25–100. • Sumber Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.		
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	2. Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	Skor Akhir ZI = (60% x Skor Pengungkit) + (40% x Skor Hasil) Dimana: • Komponen Pengungkit: penilaian terhadap pemenuhan dan implementasi area perubahan Zona Integritas, meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. • Komponen Hasil: penilaian hasil/dampak pembangunan Zona Integritas yang antara lain tercermin dari persepsi antikorupsi dan kualitas pelayanan serta indikator hasil lain sesuai LKE dan ketentuan tahun evaluasi.	Inspektorat Daerah	Kecamatan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR